

## **DAMPAK PENGUNGSIAN PENDUDUK TERHADAP KONDISI SOSIAL DI YOGYAKARTA 1946-1950**

Oleh:

Fajar Setiadi  
(13407141053)

### **Abstrak**

Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi awal dari revolusi bangsa Indonesia. Pada awal masa revolusi bangsa Indonesia harus bertempur melawan pasukan Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pertempuran – pertempuran yang terjadi mengakibatkan pembagian wilayah antara wilayah republik dan wilayah pendudukan. Pertempuran yang terjadi juga membawa penderitaan pada rakyat di daerah-daerah pertempuran, keadaan ini menimbulkan pengungsian penduduk ke tempat yang lebih aman. Yogyakarta sebagai ibukota di tahun 1946 menjadi tempat yang aman untuk mengungsi. Keadaan politik, ekonomi, dan sosial juga menjadi faktor pendorong untuk mengungsi di Yogyakarta Pertempuran yang terjadi di awal kemerdekaan sampai Agresi Militer Belanda I mengurangi banyak wilayah republik, sehingga pada masa ini banyak pengungsi yang mengungsi di Yogyakarta sebagai wilayah republik. Di Yogyakarta pengungsi mendapatkan bantuan dari pemerintah dan penduduk Yogyakarta berupa tempat tinggal dan makanan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pengungsian penduduk di Yogyakarta adalah penambahan penduduk, penambahan penduduk ini menjadi awal dari masalah pengangguran di Yogyakarta.

**Kata Kunci:** *Pengungsian, Kondisi Sosial, Yogyakarta.*

## **Abstract**

Independence of Republic of Indonesia become the dawn of the Indonesian Revolution. In the beginning of the revolution era, Indonesian peoples had to fight against the Dutch army which want to restore their power in Indonesia. The battles divided Indonesian territory into republic territories and occupied territories. The battles also brought the suffering to the civilians in the battle areas, this condition force the civilian evacuation. Civilians prefer to republic's territory rather than occupier's territory. Yogyakarta was the capital city of Republic of Indonesia which make it one of the safest area to the refugees. The politic, economic, and social condition also became several factor for refugees to go to Yogyakarta. The battle that occurred before the second Dutch Military Aggression decreased a lot of republic's territory, this condition forced a lot of refugees to evacuate to Yogyakarta. The refugees got some aids from government and Yogyakarta peoples such as places and foods. One of the several effect of the evacuation in Yogyakarta was the population added, this population added became one of the unemployment issue factor in Yogyakarta.

**Keywords:** *Evacuation, Social Condition, Yogyakarta.*

## I. Pendahuluan

Sejak tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Di awal kedatangannya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia setelah berhasil mengusir penjajah. Jepang berusaha menarik simpati para pejuang atau pelopor kemerdekaan dengan mengajak kerjasama para kelompok nasionalis dan agamawan.

Pada masa pendudukan Jepang keadaan sosial di Yogyakarta sangat buruk. Di hampir setiap daerah membentuk Panitia Penyerahan Romusha. Sebagian dari penyerahan *romusha* berasal dari kehendak sendiri, tapi juga karena paksaan. Tekanan untuk menjadi *romusha* di kota tidak begitu berat seperti di desa, meskipun juga terdapat kemelaratan dan kesengsaraan.<sup>1</sup>

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II menjadi akhir dari perang Asia Timur Raya. Berita penghentian perang oleh Jepang baru dipublikasikan secara umum kepada bangsa Indonesia pada surat kabar *Soeara Asia* yang diterbitkan pada 25 Agustus 1945.<sup>2</sup> Pasca kekalahannya, Jepang harus mengawasi wilayah yang diduduki seperti Hindia Belanda agar tidak memerdekakan diri atau dikuasai bangsa lain. Namun Indonesia tetap memproklamkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Kota Yogyakarta mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pada tanggal 5 September 1945, Yogyakarta menyatakan bergabung dengan

---

<sup>1</sup>Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 45

<sup>2</sup> Barlan Setiadijaya, *10 November 1945 : Gelora Kepahlawanan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan 10 November 1945,1992), hlm. 87.

Republik Indonesia. Keputusan politik untuk bergabung dengan Republik sangat besar pengaruhnya kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara sekutu yang telah tiba mengganggu ketertiban dan keamanan di Jakarta. Hal ini menyebabkan pemerintahan Republik yang baru merdeka memutuskan untuk memindahkan pemerintahan ke kota Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Akibat dari dipindahkannya ibukota ke Yogyakarta juga menyebabkan kota Yogyakarta didatangi banyak pengungsi dan pejuang dari berbagai daerah dalam kondisi panik.

Pada masa-masa revolusi fisik di berbagai daerah menjadi perebutan antara pasukan dari Republik dan pasukan dari Belanda dan sekutu. Di masa yang tidak kondusif ini pengungsi di hadapkan kepada dua pilihan yakni, mengungsi di daerah Republik atau di daerah pendudukan. Yogyakarta sebagai daerah Republik menjadi tempat bagi banyak pengungsi memutuskan untuk mengungsi.

## **B. Faktor Pendorong Pengungsian Penduduk di Yogyakarta**

Suasana pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah suasana yang kondusif bagi pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah harus menghadapi berbagai masalah dari dalam dan luar negeri. Masalah yang dihadapi Indonesia yang pertama adalah persoalan politik. Pasca kekalahan Jepang oleh tentara sekutu, Belanda ingin kembali ke Indonesia, dengan mengakui bahwa Indonesia bukan lagi jajahan Belanda, namun daerah Belanda yang setara dengan wilayah Belanda di Eropa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 25.

Penderitaan atau masalah di bidang ekonomi yang kongkrit dapat dilihat dari kutipan *verslag* dari daerah Tegal atau Brebes. Pada keterangannya *verslag* menyebutkan bahwa keadaan pertanian di wilayah Tegal atau Brebes tidak ada kemajuan.<sup>4</sup>

Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan dalam sektor sosial. Kondisi sosial yang belum begitu kondusif oleh pendudukan Jepang, masyarakat harus dihadapkan lagi dengan keadaan perang, sehingga penderitaan muncul dalam bentuk perpecahan antara pendukung Republik dan pendukung pendudukan sekutu di Indonesia.

Di Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pada akhir tahun 1945, situasi keamanan di ibukota Republik Indonesia di Jakarta sangat tidak aman. Situasi ini menyebabkan Ibukota berpindah ke Yogyakarta pada 1945. Perpindahan ibukota mengakibatkan penambahan penduduk di Yogyakarta, sehingga terjadilah perubahan di segala bidang kehidupan terjadi di Yogyakarta, mulai dari kehidupan sosial ekonomi, dan kehidupan politik.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> ANRI, *Pengungsian Penduduk di Jawa pada Tahun 1945 – 1950*, (Jakarta: ANRI, 2005), hlm. 164

<sup>5</sup> Amrin Imran, dkk, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), hlm. 24.

<sup>6</sup> Swastika Niken Pratiwi, “Peranan *Sub Wehrkreise* 101 Yogyakarta dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Kedua (1948-1949)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016), 34.

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah masalah yang mendasar sekaligus kompleks. Latar belakang keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan memang sangat kacau. Kekacauan yang terjadi dimulai bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni masa pendudukan Jepang di Indonesia. Faktor pendorong secara ekonomi di Yogyakarta dapat dilihat dari perwujudan bantuan kepada pengungsi. Bantuan kepada pengungsi secara ekonomi dapat dilihat dalam beberapa contoh dalam surat kabar *Antara* yang terbit pada tahun 1947.

Fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah berupa semangat nasionalisme juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Semangat revolusi nasional yang besar di berbagai daerah ini mendukung persatuan antar daerah, sehingga rakyat dapat saling membantu ketika menghadapi peperangan. Untuk terus mempertahankan revolusi nasional, daerah yang mendukung semangat menjadi sasaran untuk mengungsi.

### **C. PEMBAGIAN WILAYAH REPUBLIK DAN PENDUDUKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGUNGSIAN**

Peperangan dengan perebutan berbagai wilayah oleh tentara Belanda terjadi di sepanjang masa revolusi fisik Republik Indonesia. Peperangan ini menyebabkan terjadinya pergantian atau perebutan wilayah yang terjadi beberapa kali, satu wilayah bisa beberapa kali mengalami pergantian status kekuasaan. Pergantian-pergantian status kekuasaan inilah yang membagi wilayah Republik dan wilayah pendudukan, pembagian wilayah juga dipengaruhi oleh berbagai perundingan ataupun perjanjian. Seperti pada Agresi Militer Belanda yang

pertama setelah perjanjian Lingga Jati, dalam kasus ini Belanda secara sepihak membuat interpretasi sendiri tentang perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Untuk melihat pembagian wilayah antara republik dan pendudukan maka dibutuhkan pembagian periode pada masa revolusi fisik. Pembagian periode yang perlu diperhatikan akan dibagi atau dibatasi dalam setiap perjanjian atau perundingan dan pertempuran yang terjadi antara Republik Indonesia dan Belanda. Maka pembagian periodenya adalah, sekitar proklamasi Republik Indonesia, pasca perjanjian Lingga Jati, pasca perjanjian Renville, dan pasca Agresi Militer Belanda II. Masa setelah Agresi Militer Belanda II bisa dikatakan masa-masa peperangan terakhir antara Republik Indonesia dan Belanda, hal ini dikarenakan setelah Serangan Umum 1 Maret dan perjanjian Roem-Royen Belanda tidak lagi melakukan Agresi Militer.

Periode Pasca Proklamasi terdiri atas Pertempuran 10 November di Surabaya, peristiwa Bandung lutan api, pertempuran lima hari di Semarang, dan pertempuran Ambarawa. Pada periode pasca Perjanjian Lingga Jati terbagi atas perjanjian Lingga Jati dan Agresi Militer I. Pada periode pasca perjanjian Renville terdiri atas perjanjian Renville dan Agresi Militer II. Pada periode pasca Agresi Militer II terdiri atas pendudukan Serangan Umum 1 Maret dan Perjanjian Roem-Royen

Periode Pasca Proklamasi dalam pembahasan sebelumnya membagi serangan-serangan sekutu dan Belanda yang terjadi pasca Proklamasi. Rentang waktu dalam periode ini adalah akhir tahun 1945 sampai akhir tahun 1946. Pada

---

<sup>7</sup> Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1992), hlm. 186

periode ini dapat di telusuri asal pengungsi yang mengungsi ke Yogyakarta. Kota-kota seperti Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang telah diduduki oleh sekutu atau Belanda sangat besar kemungkinannya menjadi asal dari banyak pengungsi yang mengungsi ke Yogyakarta.

Pada masa Lingga Jati wilayah Indonesia terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Meskipun perjanjian telah ditandatangani namun Belanda membuat tafsiran-tafsiran sendiri mengenai isi perjanjian Lingga Jati, sementara itu tentaranya terus mengali masuk ke Indonesia.<sup>8</sup> Situasi kian memanas saat Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 melakukan Agresi Militernya yang pertama. Agresi Militer I di pulau Jawa menghasilkan pendudukan Belanda atas Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia tidak menjadi sasaran. Di Yogyakarta jumlah pengungsi bertambah akibat serangan dari Agresi Militer I. Akibat dari serangan ini adalah perundingan Renville.

Di pulau Jawa pasca perundingan Renville wilayahnya menjadi semakin sempit karena sebagian besar telah diduduki oleh pasukan Belanda pasca Agresi Militer I. Wilayah Republik dan Pendudukan dibatasi oleh garis Van Mook. Selanjutnya Belanda melakukan Agresi Militernya yang kedua. Agresi Militer II yang terjadi di Yogyakarta telah mengubah arus pengungsian yang sebelumnya banyak masuk ke Yogyakarta, setelah Agresi Militer II banyak penduduk yang keluar dari kota Yogyakarta menuju wilayah pedesaan di sekitar kota untuk mengungsi. Kondisi ini hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena pada



tanggal 1 Maret 1949 terjadi serangan umum yang berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia dan mengusir Belanda.

#### **D. PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUNGSIAN DAN DAMPAK PENGUNGSIAN BAGI KEADAAN SOSIAL DI YOGYAKARTA**

Pendataan jumlah penduduk di Yogyakarta mulai dilakukan oleh kepolisian setelah Agresi Militer Belanda I. Pada bagian Yogyakarta data pengungsian menunjukkan angka 39.450 dengan asal wilayah dari berbagai daerah.<sup>9</sup> Pada periode pasca Agresi Militer II ditemukan juga beberapa data mengenai pengungsian. Dari berbagai sumber yang didapatkan penduduk Yogyakarta kebanyakan bergerak menuju ke selatan di kabupaten Bantul khususnya desa Imogiri, penduduk Yogyakarta juga menuju ke barat di desa-desa kabupaten Kulon Progo.

Di Kabupaten Kulon Progo konsentrasi pengungsi ada di tiga daerah yaitu di desa Banjaroyo, desa Banjarasri, dan desa Kaligintung. Desa Banjaroyo dan Banjarasri berada di kecamatan Kalibawang, sementara itu desa Kaligintung ada di kecamatan Temon. Pengungsi yang ada di desa Banjaroyo dan Banjarasri kebanyakan dari kota Yogyakarta, meskipun begitu terdapat pula pengungsi yang berasal dari daerah Muntilan dan Magelang, hal ini dimungkinkan karena letak kecamatan Kalibawang berbatasan dengan kabupaten Magelang. Pengungsi yang datang ke Yogyakarta mendapat berbagai bantuan dari pemerintah, penduduk Yogyakarta dan organisasi masyarakat. Bantuan yang diterima antara lain adalah dibentuknya Panitia Urusan Pengungsi oleh kementerian sosial, panitia ini bertugas

---

<sup>9</sup> ANRI, *Arsip Kepolisian Negara*, No. 409. Lihat lampiran 1 Halaman 110-111.

untuk mendata dan memberikan bantuan kepada pengungsi berupa kamp dan makanan, dan melakukan koordinasi pengungsian.<sup>10</sup>

Pengungsi Tionghoa juga mendapat bantuan yang diberikan oleh organisasi Tionghoa Indonesia C.H.T.H bekerja sama dengan pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa pemondokan atau kamp, arahan tentang harga, dan juga pekerjaan. Organisasi ini juga membantu pengungsi penduduk lokal seperti yang terjadi di kamp pengungsian Gandekan. Kamp pengungsi di Gandekan ini dipimpin oleh Lie Djing Gwan dengan bantuan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia. Kamp pengungsi di Gandekan memiliki ukuran 8 meter persegi dalam setiap kamar.<sup>11</sup>

Pemerintah di tahun 1948 membentuk Panitia Urusan Pengungsi. Salah satu alasannya adalah penderitaan pengungsi yang sudah lama tidak kembali ke tempat asalnya. Pembentukan panitia pengembalian pengungsi dituliskan di surat edaran Kementrian Penerangan dikeluarkan pada tanggal 28 April 1948.<sup>12</sup> Tugas panitia ini adalah mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya baik itu di wilayah Republik Indonesia atau di wilayah pendudukan Belanda.

Pengembalian pengungsi direalisasikan pada bulan Mei 1948. Dalam mengembalikan pengungsi di bulan Mei ribuan pengungsi di tempat asalnya. Hal ini menunjukkan pemulangan pengungsi setelah beberapa bulan mengungsi di Yogyakarta akibat dari Agresi Militer Belanda pertama. Pertambahan pengungsi

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 91. Mengutip dari berita *Antara* 11 Juli 1946.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 144. Mengutip dari berita *Antara* 25 Agustus 1947.

<sup>12</sup> ANRI, *Kementrian Penerangan*, No. 223, 1948

yang banyak terjadi setelah serangan Belanda pada Agresi Militer I. Keadaan ini nampaknya menjadi masalah bagi penduduk yang mengungsi di Yogyakarta. Pada masa itu suara-suara yang menunjukkan kekecewaan terhadap pemerintah telah muncul, kekecewaan ini berupa buruknya perlindungan dan perawatan yang diberikan pemerintah di ibukota Yogyakarta.<sup>13</sup>

Masalah lain yang dihadapi pengungsi adalah kesukaran dalam perjalanan mengungsi. Contoh kesukaran dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh dua orang Tionghoa yang mengungsi di Gandekan Yogyakarta, mereka bernama Lim Sui Seng yang berusia 83 tahun, dan Gouw Sie Jap yang telah berumur 86 tahun. Pada keterangannya mereka mengaku amat menderita dalam perjalanan menuju Yogyakarta dari Wonorosolo. Mereka juga mengaku telah berjalan dari Wonorosolo ke Kebumen sejauh kurang lebih 5 kilometer.<sup>14</sup>

Pertambahan penduduk yang terjadi di Yogyakarta juga mengakibatkan pelanggaran administrasi kependudukan. Masalah ini nampaknya berakibat pada rumah milik Liem Tjoen Kiat pada akhir tahun 1949. Liem Tjoen Kiat telah melaporkan adanya pelanggaran keadministrasian, pelanggaran ini mengakibatkan dirinya diusir dari rumah miliknya tersebut setelah kembali dari pengungsian.<sup>15</sup>

Pengungsian ke Yogyakarta membawa perubahan yang sangat besar, karena dengan mendadak kota Yogyakarta telah di banjiri penduduk yang berasal dari Jakarta dan penduduk dari daerah lain. Data yang diambil berasal dari Arsip

<sup>13</sup> ANRI, (1948), *loc.cit.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, Mengutip dari berita Antara 25 Agustus 1947.

<sup>15</sup> ANRI, Liem Tjoen Kiat, Surat Pengaduan, 1949.

Kepolisian Negara No. 409 yang berisi daftar pengungsian mulai 12 Juli 1947 sampai 1 Februari 1948. Dari data arsip tersebut tercatat jumlah pengungsi di Yogyakarta sebanyak 39.450 jiwa berasal dari berbagai daerah.<sup>16</sup> Pertambahan penduduk yang banyak dari datangnya pengungsi akan menimbulkan semacam gejala sosial yang terjadi di Yogyakarta, gejala tersebut dapat berupa tantangan untuk menerima berbagai macam penduduk dari luar kota Yogyakarta.

Masalah lain yang dihadapi oleh penduduk Yogyakarta adalah kenaikan harga barang. Kenaikan harga kebutuhan terjadi karena banyak penduduk dari luar kota membawa banyak uang, namun para pengungsi itu melakukan penawaran secara tidak aturan. Hal ini di respons oleh pedagang lokal dengan menaikkan harga barang. Harga-harga yang naik antara lain telur bebek yang sebelumnya 2,5 sen menjadi Rp. 2, harga beras 1 kg menjadi Rp. 8 atau Rp. 9 sebelumnya Rp 2,5 atau Rp. 3, telur ayam Rp. 1,50.<sup>17</sup>

Untuk kebutuhan pangan pengungsi terdapat dapur umum yang dapat menyediakan makanan, namun dapur umum pada kebanyakan kasus dikhususkan untuk para pejuang, sehingga setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda lokasi dapur umum kebanyakan berada di pos SWK seperti di desa Segoroyoso. Dari sumber-sumber tertulis dan beberapa wawancara di daerah-daerah pengungsian yang bukan pusat SWK umumnya pengungsi mendapatkan makanan dari keluarga

---

<sup>16</sup> ANRI, Arsip Kepolisian Republik Indonesia No. 409.

<sup>17</sup> “Kebanyakan Pengungsi”, *Kedautalan Rakyat*, 1 Maret 1946.

di mana pengungsi itu tinggal, seperti di desa Selopamiro kecamatan Imogiri<sup>18</sup> Untuk kebutuhan tempat tinggal pada dasarnya penduduk lokal dengan sukarela mempersilakan pengungsi dan pejuang untuk tinggal di rumahnya. Penyediaan tempat tinggal dari penduduk lokal sudah terjadi sejak ibukota berpindah ke Yogyakarta. Banyak pengungsi yang datang khususnya dari Jakarta sejak Yogyakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia, pada masa ini hampir setiap kepala keluarga di Yogyakarta menerima kedatangan pengungsi ini di rumah mereka.<sup>19</sup>

Dampak sosial berupa persaudaraan juga penulis temukan ketika mewawancarai penduduk lokal di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Seperti yang terjadi di Imogiri saat terjadinya Agresi Militer II di Yogyakarta, ribuan pengungsi yang datang ke Imogiri justru memupuk kesadaran akan persatuan dan keberadaan bangsa Indonesia kepada rakyat Imogiri, sehingga mereka sanggup untuk mempertahankannya baik dengan jiwa atau raga.<sup>20</sup> Di Desa Pajimatan pengungsian penduduk dari Yogyakarta yang terjadi pasca Yogyakarta direbut Belanda telah menimbulkan persaudaraan antar penduduk lokal dan pengungsi dari Yogyakarta.<sup>21</sup> Di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Desa

---

<sup>18</sup> Dharmono Hardjowidjono, dkk, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta: Buku Kedua*, (Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di DIY, 1984, hlm. 261.

<sup>19</sup> Rika Inggit Asmawati, *op.cit.* hlm. 32. Mengutip lukisan “*Mengungsi*” dibuat pada tahun 1959.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 189.

<sup>21</sup> Wawancara dengan M.J Abdul Jalal pada tanggal 24 Maret 2017 di Desa Pajimatan.

Banjarasri persaudaraan juga terjalin antara penduduk lokal Banjarasri dengan keluarga yang dulu pernah mengungsi.<sup>22</sup>

Pengungsian di Yogyakarta juga telah menyebabkan pengangguran. Pengangguran yang terjadi di Yogyakarta di tahun 1950 tidak terlepas dari banyaknya jumlah pertambahan penduduk. Faktor pertambahan penduduk dari luar kota. Bertambahnya penduduk dari luar kota di Yogyakarta telah terjadi sejak ibukota berpindah ke Yogyakarta.<sup>23</sup>

### **E. Kesimpulan**

Kota Yogyakarta sebagai wilayah kesultanan yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Sultan Hamengku Buwono IX mengusulkan untuk memindahkan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebagai ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta juga memiliki ketahanan di bidang ekonomi lebih baik dari pada daerah lain di pulau Jawa yang dikuasai republik. Sektor sosial juga mendukung banyak pengungsi untuk mengungsi ke Yogyakarta karena karakter penduduk Yogyakarta yang pemurah dan penerima.

Pembagian wilayah di pulau Jawa pada masa perang kemerdekaan ditentukan dengan perang yang terjadi dan juga perundingan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya perang yang berdampak pada pembagian wilayah adalah upaya mempertahankan atau memperebutkan suatu wilayah.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Parwono pada tanggal 14 April 2017 di Desa Banjarasri.

<sup>23</sup>Rika Inggit Asmawati, *op.cit.*, hlm. 93. Mengutip Duto Wijayanto, “*Konflik, Kekerasan dan Kriminalitas di Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta tahun 1945-1950*”, tesis, Pasca Sarjana FIB UGM, 2011. Hlm. 85.

Dampak dari peperangan untuk memperebutkan wilayah salah satunya adalah pengungsian penduduk.

Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta menyediakan berbagai bantuan kepada pengungsi, bantuan yang diterima berupa tempat tinggal sampai pekerjaan, sehingga pengungsi dapat merasa aman dan juga tercukupi kebutuhannya. Bantuan lain berupa pengangkutan pengungsi dari daerah perang ke daerah yang lebih aman seperti Yogyakarta. Untuk pengungsi Tionghoa terdapat organisasi C.H.T.H dengan bantuan pemerintah, selain itu organisasi ini juga menerima atau membantu pengungsi Indonesia.

Dampak dari pengungsian penduduk terhadap keadaan sosial di Yogyakarta dapat dilihat dari membludaknya jumlah penduduk di Yogyakarta, sehingga terjadi gejolak sosial di Yogyakarta dengan jumlah penduduk yang meningkat secara cepat. Pasca revolusi fisik berakhir penduduk Yogyakarta meningkat, salah satunya oleh pengungsi yang menetap di Yogyakarta. Akibat dari penambahan penduduk setelah masa revolusi fisik di Yogyakarta salah satunya terjadi pengangguran di tahun 1950-an. Dampak lain dari pengungsian terhadap penduduk lokal adalah terjalinnya persaudaraan antara pengungsi dengan penduduk lokal. Persaudaraan ini terjalin akibat dari pengungsian yang terjadi saat Yogyakarta diambil alih oleh Belanda lewat Agresi Militer Belanda II.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

ANRI, Liem Tjoen Kiat, Surat Pengaduan, 1949.

ANRI, *Kementrian Penerangan*, No. 223, 1948.

ANRI, *Arsip Kepolisian Negara*, No. 409, 1948.

### Buku

ANRI. 2005. *Pengungsian Penduduk Di Jawa Tahun 1945-1949*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Barlan Setiadijaya, *10 November 1945 : Gelora Kepahlawanan Indonesia*, Jakarta: Yayasan 10 November 1945, 1992.

Dharmono Hardjowidjono, dkk, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta: Buku Kedua*, Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di DIY, 1984

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990, hlm. 45

Loebis, Aboe Bakar, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Nasution, A. H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 4*, Bandung: Angkasa, 1978.

Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedomanan Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013

### Koran

“Kebanyakan Pengungsi”, *Kedautalan Rakyat*, 1 Maret 1946.

### Tesis dan Skripsi

Swastika Niken Pratiwi, “Peranan *Sub Wehrkreise* 101 Yogyakarta dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Kedua (1948-1949)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2016



Rika Inggit Asmawati, "Tunakarya di Negara Baru Merdeka: Pengangguran Revolusi Yogyakarta 1950-an", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015

### Daftar Responden

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir/ Usia	Pekerjaan		Alamat
			Dulu	Sekarang	
1	MJ Abdul Jalal	Yogyakarta/ 66	Abdi Dalem Masji Makam Imogiri	Abdi Dalem Masji Makam Imogiri	Pajimatan, Girirejo Imogiri, Bantul, Yogyakarta
2	Parwono	Yogyakarta/ 73	Kepala Desa Banjarasri	Pensiunan	Boro Suci, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta